

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul, Wahab Solichin. 2016. *Analisis Kebijakan Publik Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Agustino, Leo. 2020. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia
- Fisip, Untan. *Panduan Skripsi Fisip Untan*. Pontianak: Fisip Untan
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya
- Moenek, Reydonnyzar and Suwanda, Dadang. 2019. *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2015. *Kebijakan Publik Di Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Santoso, Purwo. 2010. *Modul Pembelajaran Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Research Center for Politics and Government
- Sinambela, Lijan Poltak dkk. 2015. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Wekke, Ismail Suardi dkk. 2019. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe Buku

Widodo, Joko. 2021. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayu Medya Publising

Jurnal :

Dawud Joni, Abubakar Rodlial Ramdhan Tackbir, Ramdhani Deni Fauzi. (2020). *Implementasi Kebijakan Online Single Submission pada Pelayanan Perizinan Usaha (Studi Kasus di DPMPTSP Kota Bandung & Kabupaten Bandung)*. Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, Vol. 12 No. 2: 83-92.

Robby, & Tarmini. (2019). *Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission (OSS): Studi Pada Izin Usaha Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi*. Administratio, 10(2).

Dokumen :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik